

## Penerapan Strategi Value For Money (3E) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jakarta Tahun 2022

Zanneta Althaf Nabila<sup>1</sup>, Sonny Fransisco Siboro<sup>2</sup>, Tasya Derdameisya Aurelia<sup>3</sup>,  
Mochamad Fachrizal Yusuf<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl Margonda No , Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Korespondensi penulis: [zanetaalthaf493@gmail.com](mailto:zanetaalthaf493@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study explores the use of Value for Money (VFM) strategies to improve local government performance of Jakarta City in 2022. Using qualitative research methods, data was collected through in-depth interviews and document analysis. The results show that VFM has improved local government performance in managing budgets and resources, enabling better service provision to residents. The findings highlight the importance of efficiency, effectiveness and accountability in public financial management, and emphasize the potential of VFM strategies to improve public sector performance.*

**Keywords:** Value For Money, Economy, Efficiency, Local Government, Effectiveness

**Abstrak.** Studi ini mengeksplorasi penggunaan strategi Value for Money (VFM) untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kota Jakarta tahun 2022. Dengan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa VFM telah meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya, memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik kepada penduduk. Temuan ini menyoroti pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta menekankan potensi strategi VFM untuk meningkatkan kinerja sektor publik.

**Kata kunci:** Value For Money, Ekonomi, Efisiensi, Pemerintah Daerah, Efektivitas

### LATAR BELAKANG

Di Indonesia, penerapan prinsip otonomi daerah telah membawa perkembangan besar dalam akuntansi sektor publik. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, daerah otonom memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Seperti yang disarankan oleh OECD pada tahun 2010, pemerintah harus menilai proyek untuk mencerminkan konsep "Nilai Uang". OECD juga mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan pemerintah terbuka.

Menurut Higher Education Funding Council for England atau HEFCE (2016) bahwa Value For Money adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diproduksi dengan sumber daya yang tersedia untuk itu. Beberapa elemen mungkin bersifat subjektif, sulit diukur, tidak berwujud, dan salah dipahami. Oleh karena itu, diperlukan standar saat mempertimbangkan apakah Value For money yang telah dicapai memuaskan atau tidak. Maka dari itu, konsep Value for Money sesuai dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan Open Government.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja mengemukakan bahwa Instansi Pemerintahan mewajibkan semua instansi yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan negara, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ababe (2012), efisiensi dalam menjalankan kepentingan publik adalah kunci untuk memastikan bahwa lembaga publik menggunakan anggaran dengan cara terbaik. Provinsi Kota DKI Jakarta adalah Daerah kota yang mempunyai luas total 662,33 km<sup>2</sup>, Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Dalam Laporan Kinerja (LKJ) adalah cara untuk memberi tahu publik tentang bagaimana pemerintah beroperasi. Salah satu cara untuk memberikan informasi tentang perencanaan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah adalah dengan menyusun Laporan Kinerja dan Informasi Kinerja Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dari Laporan Kinerja dan Informasi Kinerja Pemerintah adalah mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Pada tahun 2022 Pemerintah melakukan pengukuran ketimpangan pendapatan. Dimana informasi yang dikeluarkan oleh BPS nilai rasio gini berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan jika nilai tersebut semakin mendekati 1 nilai tersebut menandakan bahwa tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya jika rasio gini semakin mendaki angka 0 maka menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada rasio gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna. Dapat dilihat pada tren indeks rasio gini Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Gambar 1. Tren Indeks Rasio Gini

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta (garis biru) secara umum berada di atas tren Indeks Rasio Gini Nasional (garis oranye) selama periode 2017-2022. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Penurunan Rasio Gini di DKI Jakarta terjadi dalam kurun 2017-2018 kemudian terus meningkat hingga 2022. Maka dari itu Pemerintah selalu berdedikasi untuk menjadi entitas yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan secara konsisten memberikan layanan yang beragam, termasuk dalam bidang kesehatan, keamanan, pendidikan, serta bidang lainnya. Maka dari itu, Pemerintah harus mencapai reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah melakukan perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta menghilangkan pungutan liar, khususnya di bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada Penerapan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan prinsip "Value For Money" berdasarkan data yang tersedia dan konteks yang diuraikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyederhanakan penilaian kinerja sektor publik di Provinsi Kota Jakarta yang menekankan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dan Indikator Kinerja**

Menurut Effendi (2008), Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) mempersederhanakan pengukuran kinerja dengan memilih beberapa indikator kinerja khusus yang menunjukkan keberhasilan organisasi, tujuan dan sarannya, serta program kegiatan. Sesuai dengan arahan Pemerintah dalam UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999, reformasi lembaga sektor publik di Indonesia sangat penting. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel, kedua undang-undang tersebut memberikan dasar untuk berbagai reformasi kelembagaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan adalah dokumen yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dan aktivitas transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Mutia, dikutip dalam Riadi (2020), ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja:

1. Indikator kinerja input (masukan), yang mencakup faktor-faktor yang diperlukan untuk melakukan kegiatan untuk menghasilkan output yang diinginkan, seperti dana, sumber daya manusia, informasi, dan lain- lain.
2. Indikator kinerja output (keluaran), yang mencakup hal-hal yang diharapkan dapat dicapai langsung dari suatu kegiatan, baik hasil fisik maupun non- fisik.
3. Indikator kinerja dampak (impact) merujuk pada pengaruh yang dihasilkan, baik secara positif maupun negatif, pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

### **Belanja Daerah dan Pendapatan LRA**

Pemerintah dapat melacak penggunaan dan pengelolaan dana publik secara menyeluruh dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja dan pendapatan. Mereka juga dapat mengawasi sumber pendapatan yang masuk untuk memastikan pengeluaran dan pendapatan seimbang.

Anggaran sektor publik melakukan banyak fungsi penting, seperti perencanaan, pengendalian, dan kebijakan fiskal; itu juga berfungsi sebagai alat politik, koordinasi, dan komunikasi; dan untuk menilai kinerja, memberikan insentif, dan menyediakan ruang publik (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan-LRA adalah total uang yang masuk ke kas umum daerah, yang meningkatkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran tertentu. Ini adalah hak pemerintah daerah dan tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan Belanja adalah semua pengeluaran yang dibuat melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikurangi dari Saldo Anggaran Lebih pada tahun anggaran tertentu dan tidak akan dikembalikan oleh pemerintah daerah.

### **Keuangan Daerah**

APBD berfungsi sebagai landasan utama untuk pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, merangkum semua rencana pendapatan dan pengeluaran daerah dan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi selama periode anggaran tertentu. Tujuan dari proses pemotongan pendapatan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Halim (2001) menyatakan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik. Bratakusumah dan Solihin (2004) mengartikan pengelolaan keuangan daerah sebagai semua tanggung jawab dan hak

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur secara finansial, terutama dalam kerangka APBD yang dikelola dengan baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Setiap tahun, BPK sebagai auditor eksternal pemerintah akan memeriksa pengelolaan keuangan daerah dua kali. Selama audit laporan keuangan pemerintah daerah, BPK akan memeriksa hingga ke tingkat SKPD untuk mengevaluasi kepatutan penyajian laporan keuangan SKPD tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah secara langsung berkorelasi dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Dengan kata lain, semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah, semakin besar kemungkinan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri akan meningkat.

### **Penerapan Value For Money**

Value for money adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam organisasi sektor publik. Konsep ini tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga memperhitungkan aspek non-keuangan sebagai dasar untuk menilai seberapa berhasilnya suatu program kerja di dalam organisasi sektor publik.

Dalam mencapai Value For Money, pengukuran barang dan jasa yang ekonomis, efisien, dan efektif merupakan tiga elemen utama yaitu :

1. Ekonomis dalam arti hemat atau tepat guna dan tidak ada pemborosan dan dikatakan ekonomis apabila kegiatan dapat menghilangkan biaya yang tidak perlu.
2. Efisien yang berkaitan dengan konsep produktivitas. Dalam arti, proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil pekerjaan tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana seminimal mungkin.
3. Efektif yaitu yang hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang dicapai.

Dan ada beberapa elemen lainnya yang perlu ditambahkan yaitu :

- a) Ekuitas, yang berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan public
- b) Kesetaraan, yang berarti semua dana dialokasikan secara sama untuk pelayanan public.
- c) Masukan, yang berarti sumber daya yang digunakan untuk menerapkan kebijakan, program, dan inisiatif.

### **Konsep Pengukuran Value For Money**

Setelah menentukan jumlah input, output, dan hasil, Mardiasmo (2002) melanjutkan untuk menghitung nilai ekonomi, efisien, dan efektivitas yaitu sebagai berikut:

- Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ini terkait dengan seberapa efektif mempertimbangkan keluaran (output) yang diperoleh, dan pengukuran ini juga harus

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

mempertimbangkan masukan (input). Rumus pengukuran ekonomis adalah sebagai berikut:

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

- Pengukuran Efisiensi

Rasio antara input dan output adalah ukuran efisiensi. Rasio ini tidak ditunjukkan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relative. Unit A lebih efisien dari unit B, sementara unit A lebih efisien tahun ini daripada tahun sebelumnya.

Dua jenis efisiensi dalam pengukuran kinerja value for money adalah efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi mengacu pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial) mengacu pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Rumus pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

- Pengukuran Efektifitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Efektifitas tidak

menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek dan Jenis Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menyajikan berbagai informasi dari penelitian sebelumnya, dengan dokumen yang relevan, dan gambar atau tabel untuk menjelaskan dan memahami subjek yang diteliti. Sehingga Informasi yang dijelaskan dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan untuk memberikan informasi dan fakta – fakta keadaan sebenarnya terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Dengan focus penelitian ini tentang penerapan strategi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip Value For Money pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan kinerja Provinsi DKI Jakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan membaca literatur, buku, atau jurnal ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis yang menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengukuran Realisasi Kinerja Provinsi DKI Jakarta**

Hasil Analisis Pengukuran Kinerja Metode Value for Money pada kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebagai berikut :

Untuk mencapai misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam 23 sasaran strategis dan 60 indikator kinerja, sebagian besar indikator berhasil mencapai kisaran 90% hingga 100%. Tiga indikator sasaran, salah satunya adalah Skor EKPPD, yang berhasil dicapai.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran untuk 9 program yang ada di 10 Biro adalah 97,66%. Jumlah total anggaran yang dikelola adalah sebesar 1.193.443.576.535, dengan tingkat realisasi yang berhasil sebesar 1.165.501.794.696. angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program sesuai dengan rencana kerjanya

Pada tahun ini Akuntabilitas kinerja menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta juga berhasil dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi pada tahun 2022 masi terdapat realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang sangat tinggi hal ini terjadi karena disebabkan oleh realisasi SILPA pada tahun sebelumnya sebesar 10.701.364.203.815,00 atau 213,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 5.015.108.618.305,00.

Dan terdapat realisasi pembiyaan daerah sebesar 4.526.625.491.573,00 atau 77,52% dari anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun 2022. Karena hal ini menimbulkan ketidak tercapainya pengeluaran daerah yang terdapat pada realisasi Penyertaan Modal Daerah sebesar 73,94% karena pembangunan instalansi jalur kereta api yang belum selesai dan hanya terealisasi atas pembayaran uang muka pekerjaan.

Maka dari itu dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat kita lihat pada perhitungan dengan konsep “Value for Money”. Rincian data APBD dan RAPBD Pemerintah Daerah Kota Jakarta yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 31 Desember 2022 (Kab/Kot)	(%)	(Dalam Rupiah)
						Realisasi 31 Desember 2021 (Kab/Kot)
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	45.706.000.000.000	40.276.148.106.210	88,13	34.575.903.210.175
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	806.879.380.000	376.977.988.704	46,72	363.859.710.282
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	792.735.037.401	482.424.106.447	60,70	306.702.099.882
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	4.362.220.915.771	4.003.804.434.540	91,78	3.248.002.495.021
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>		<b>55.667.834.732.852</b>	<b>45.086.964.729.901</b>	<b>81,04</b>	<b>41.806.327.493.433</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2				
9	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	17.196.794.476.801	18.015.174.546.549	104,50	22.830.423.484.682
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	13.963.139.165.613	15.052.850.199.337	115,20	19.390.950.594.125
11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.2	34.127.101.188	34.127.191.180	100,00	46.940.443.417
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.3	3.190.539.234.000	2.794.808.308.024	87,60	3.190.539.446.510
13	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2	20.484.233.000	20.804.233.000	101,57	45.179.960.808
14	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2	20.484.233.000	20.804.233.000	101,57	45.179.960.808
15	<b>Total Pendapatan Transfer (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)</b>		<b>17.226.478.703.801</b>	<b>18.866.456.779.549</b>	<b>109,49</b>	<b>22.673.754.344.652</b>
16	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.3				
17	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	4.007.334.370.808	2.821.315.083.058	70,40	1.296.907.446.310
18	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (17)</b>		<b>4.007.334.370.808</b>	<b>2.821.315.083.058</b>	<b>70,40</b>	<b>1.296.907.446.310</b>
19	<b>Jumlah Pendapatan (7 + 16 + 18)</b>		<b>77.794.647.728.361</b>	<b>67.299.479.172.368</b>	<b>86,50</b>	<b>65.981.309.198.000</b>
20	<b>BELANJA</b>					
21	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1.1				
22	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1	18.038.800.298.501	17.726.440.378.717	98,30	18.814.237.619.714
23	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.2	25.076.851.720.022	23.813.348.690.299	94,56	21.498.463.347.546
24	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	789.540.302.919	279.802.798.937	35,44	86.116.019.380
25	Belanja Suci	5.1.2.1.1.1.f	6.542.380.628.282	6.279.302.994.910	95,98	4.303.281.071.460
26	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.g	2.814.872.088.919	2.639.327.211.330	93,76	2.891.074.489.018
27	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.h	5.115.246.023.900	5.036.454.989.740	98,44	6.628.340.229.987
28	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.i	5.115.246.023.900	5.036.454.989.740	98,44	6.628.340.229.987
29	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.j	-	-	-	243.163
30	<b>Jumlah Belanja Operasi (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)</b>		<b>66.971.670.881.413</b>	<b>65.542.186.869.782</b>	<b>97,98</b>	<b>63.826.743.778.318</b>
31	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.1.2				
32	Belanja Tanah	5.1.2.1.2.a	1.904.948.891.345	880.953.930.338	46,25	1.419.005.059.804
33	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.2.b	2.029.916.746.175	1.798.854.059.080	88,62	1.323.912.540.710
34	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.2.c	2.054.535.946.720	1.720.904.617.000	83,74	3.149.816.330.166
35	Belanja Jalan, Jembatan dan Jalinan	5.1.2.1.2.d	4.699.208.720.297	4.264.727.280.528	90,75	1.651.626.167.407
36	Belanja Alat Transportasi	5.1.2.1.2.e	167.416.167.860	127.754.673.737	75,72	329.487.322.827
37	<b>Jumlah Belanja Modal (31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>		<b>10.860.386.472.317</b>	<b>8.808.134.642.704</b>	<b>81,16</b>	<b>6.864.823.218.218</b>
38	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.1.3				
39	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.3	6.714.844.382.383	20.976.747.830	0,45	439.889.487.190
40	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (38)</b>		<b>6.714.844.382.383</b>	<b>20.976.747.830</b>	<b>0,45</b>	<b>439.889.487.190</b>
41	<b>Jumlah Belanja (20 + 37 + 39)</b>		<b>76.487.483.736.118</b>	<b>64.380.354.160.886</b>	<b>84,17</b>	<b>65.221.446.250.253</b>
42	<b>TRANSFER</b>					
43	<b>TRANSFERBANTUAN KEUANGAN</b>	5.1.2.1.4				
44	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.1.4	484.782.883.210	484.782.883.210	100,00	387.579.919.312
45	<b>Jumlah Transfer (43)</b>		<b>484.782.883.210</b>	<b>484.782.883.210</b>	<b>100,00</b>	<b>387.579.919.312</b>
46	<b>Jumlah Belanja DAN TRANSFER (41 + 45)</b>		<b>76.972.186.289.328</b>	<b>64.865.127.220.296</b>	<b>84,27</b>	<b>65.610.046.169.565</b>
47	<b>SURPLUS/DEFISIT (19 - 46)</b>		<b>1.822.461.439.033</b>	<b>2.424.351.952.072</b>		<b>3.647.966.128.433</b>

Sumber : LKPD Provinsi DKI Jakarta

## 1. Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis memerlukan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya finansial maka dari itu dapat dilihat tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan cara perbandingan antara belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Pengukuran Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Ekonomis} &= \frac{55.542.186.969.752}{58.971.570.881.413} \times 100 \% \\ &= 94,2\% \end{aligned}$$

Ketentuan:

Jika &lt; 100% berarti ekonomis

Jika &gt; 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Dari perhitungan diatas, bahwa pada tahun 2022 perkembangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih nilai yang sangat tinggi dalam mengembangkan strategi value for money. Grafik tersebut mengidentifikasi bahwa setiap satuan PDB yang dilaksanakan pemerintah menghasilkan rata – rata pertumbuhan ekonomi sebesar 94,2 unit atau sebesar 0,942. Angka ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam penggunaan nilai tukar mata uang dimana pengeluaran pemerintah menghasilkan manfaat yang signifikan.

Dengan kata lain, setiap nilai yang diinvestasikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jakarta dan mendorong akuntabilitas dan transparansi yang baik.

## 2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisien ini menggambarkan kemampuan suatu instansi dalam menggunakan sumber daya yang terbatas secara optimal untuk menghasilkan output yang berkualitas.

$$\begin{aligned}\text{Pengukuram Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \% \\ &= \frac{55.42.186.969.752}{45.608.404.729.501} \\ &= 121,8\%\end{aligned}$$

Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

Pengukuran Efisien pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 berhasil memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang realtif tinggi jika dibandingkan dengan nilai atau manfaat yang diterima sebesar 121,8% atau 1,218. Dengan pengukuran efisien yang tinggi dapat menunjukkan bahwa hal tersebut dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

## 3. Pengukuran Efektivitas

Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan

output. Dengan ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap investasi atau pengeluaran yang dilakukan setiap instansi memberikan hasil terbaik.

$$\text{Pengukuran Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Efektifitas} &= \frac{45.608.404.729.501}{55.662.834.753.592} \\ &= 81,9\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 anggarannya dikatakan berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan sebesar 81,9% atau 0,819. Meskipun hasil dari perhitungan tersebut ke efektifannya tidak 100%, namun hal ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan sumber daya dan operasional dengan sehari – harinya menggunakan pengukuran efektif untuk mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih ada ruang untuk berupaya dalam mencapai biaya yang serendah – rendahnya dengan konsep *value for money*.

### Hasil Atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Menurut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar standar transparansi fiskal, dengan tingkat pencapaian berikut:

- 24 kriteria, yang terdiri dari 7 kriteria untuk pelaporan fiskal, 8 kriteria untuk prakiraan dan penganggaran fiskal, 8 kriteria untuk analisis dan manajemen risiko fiskal, dan 1 kriteria untuk manajemen pendapatan sumber daya, mencapai tingkat advance.
- Ada 15 kriteria yang mencapai tingkat Good, dengan 5 kriteria pada pelaporan fiskal, 4 kriteria pada prakiraan fiskal dan penganggaran, 3 kriteria pada analisis dan manajemen risiko fiskal, serta 3 kriteria pada manajemen pendapatan sumber daya.
- Dan sebanyak 8 kriteria masih berada pada level Basic yang terdiri dari 1 kriteria pada pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal Dan 7 kriteria pada pilar Manajemen Pendapatan sumber Daya

Penilaian tersebut didasarkan atas praktik – praktik yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2022.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan data yang sudah dijabarkan diatas penggunaan strategi Value For Money dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara akurat, penerapan strategi Value for Money juga membantu menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan penerapan strategi Value for Money Pemerintah Kota DKI Jakarta dapat mengevaluasi laporan keuangan realisasi anggaran dan belanja daerah untuk menemukan cara yang lebih efisien untuk mengelola sumber daya keuangan dan untuk mengurangi kemungkinan pemborosan atau penyalahgunaan dana publik.

Dengan menggunakan pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, kita dapat menilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja apakah sudah mengikuti strategi yang telah direncanakan atau belum secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kinerja masi harus diperbaiki lagi. Walaupun dengan perhitungan pengukuran Value for money pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk kategori berhasil dalam menunjukkan peningkatan akan tetapi masi harus mengurangi ketimpangan pendapatan dengan cara investasi dalam infrastruktur public seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih yang mampu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat

Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa investasi dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak hanya itu Dengan meningkatkan pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya, pemerintah DKI Jakarta dapat mengurangi ketergantungannya pada penerimaan pembiayaan. Dengan diversifikasi sumber pendapatan, pemerintah dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan dan mengurangi risiko fluktuasi penerimaan pembiayaan.

Selain itu Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan evaluasi kebijakan fiskal seperti kebijakan pajak dan subsidi yang berdampak pada penerimaan pembiayaan yang tinggi. Dengan menemukan dan menghilangkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan, pemerintah dapat mengurangi tekanan terhadap penerimaan pembiayaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik.

---

## DAFTAR REFERENSI

- Accountability, T. (n.d.). Penerapan konsep value for money dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran. Implementation of the value for money concept in increasing accountability, transparency and supervision toward budget.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Jakarta: BPK RI.
- Bastian, I. (2017). Akuntansi manajemen sektor publik: Suatu pengantar (Edisi 3). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hartati. (2020). Pengukuran kinerja sektor publik: Teori dan aplikasi: Performance measurement / Pengukuran kinerja. [https://drive.google.com/file/d/13zS576xtX80zMiovZqepPiEUPEpJMR2\\_/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/13zS576xtX80zMiovZqepPiEUPEpJMR2_/view?usp=sharing)
- Muhammad Ichlasul Amal, & Wibowo, P. (2022, September). Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. [https://www.researchgate.net/publication/363192564\\_Analisis\\_Kinerja\\_Keuangan\\_Pemerintah\\_Provinsi\\_DKI\\_Jakarta\\_Sebelum\\_Dan\\_Sesudah\\_Pandemi\\_Covid-19](https://www.researchgate.net/publication/363192564_Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Provinsi_DKI_Jakarta_Sebelum_Dan_Sesudah_Pandemi_Covid-19)
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). LKPD DKI 2022 (pp. 1–1047). <https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/LKPD2022>
- Putri, R. M., & Riyanto, E. (2019). Analisis pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance (Studi kasus Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 74-85.
- Saputra, G. I., & Adi, S. W. (2021). Analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan metode value for money pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun .... <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/93720>
- Susanti, R. (2020). Penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran belanja daerah Provinsi DKI Jakarta. Tesis Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Widodo, W., & Suhartati, T. (2021). Strategi value for money dalam peningkatan kinerja pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 227-239.